



R E N J A

**RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Palangka Raya, November 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**
BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	30
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	31
3.3 Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
BAB V PENUTUP	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya lebih lanjut diatur ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam peraturan dimaksud diamanatkan bahwa Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan PD.

Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang disusun untuk periode Tahun 2023 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, sehingga penyusunan Renja PD dilakukan secara silmutan/paralel dengan Penyusunan Rancangan Awal RKPD.

Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah disusun agar dapat memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama dalam Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian akan dapat memberikan gambaran tentang arah dan tujuan program, target kinerja yang akan dicapai serta kegiatan pelayanan sosial yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Renja PD merupakan proses awal dari penyusunan perencanaan program dan anggaran PD yang akan terkait dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, sehingga program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renja PD akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Kalimantan Tengah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Renja PD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan Program Tahun Anggaran 2023, yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.

2. Tujuan

- a. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023.
- b. Merencanakan target dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ini, disusun terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan capaian Renstra PD, analisis kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, terdiri dari telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan dan sasaran Renja PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, dan sumber dana dari program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan.

BAB V PENUTUP memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2021 dan Capaian Renstra PD

Pada Tahun Anggaran 2021, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mengelola anggaran sebesar **Rp. 21.845.492.424,-** (Dua puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 21.779.463.424,-** (Dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) dan Belanja Modal **Rp. 66.029.000,-** (Enam puluh enam juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

Adapun tingkat Capaian dan Realisasi anggaran dimaksud adalah sebagai berikut :

Dana APBD Provinsi

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.605.492.424	19.973.395.465	92,45	95,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	181.907.000	179.217.600	98,52	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.095.556	48.450.300	94,82	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.811.444	50.787.300	99,95	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000	39.980.000	99,95	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.013.537.180	8.737.735.472	87,26	100,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.995.287.180	8.719.584.472	87,24	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.873.000	10.796.000	99,29	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.377.000	7.355.000	99,70	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000	0	0,00	0,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000	0	0,00	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000	73.477.400	100,00	100,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.500.000	73.477.400	91,85	95,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500.000	0	0,00	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	547.097.400	538.218.250	98,38	100,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.265.000	10.250.000	99,85	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Relisasi Keuangan		Realisasi Fisik
			Rp	%	(%)
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.984.000	90.577.000	92,44	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.598.000	24.590.000	99,97	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	9.000.000	90,00	100,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	19.990.000	99,95	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.145.400	282.869.000	99,90	100,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	101.105.000	100.942.250	99,84	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.660.450.844	10.344.858.513	97,04	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.992.000	99,84	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.498.844	187.145.135	78,47	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.416.952.000	10.152.721.378	97,46	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.000.000	99.888.230	83,24	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.000.000	73.198.230	81,33	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	26.690.000	88,97	100,00
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	240.000.000	238.233.500	99,26	100,00
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	174.250.000	173.519.500	99,58	100,00
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	78.500.000	78.233.000	99,66	100,00
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	15.750.000	15.386.000	97,69	100,00
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	78.000.000	77.900.500	99,87	100,00
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	65.750.000	64.714.000	98,42	100,00
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000	14.870.000	99,13	100,00
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	50.750.000	49.844.000	98,21	100,00
	JUMLAH	21.845.492.424	20.211.628.965	92,52	95,00

Secara keseluruhan, target pelaksanaan Renja Tahun 2021 khususnya yang bersumber dari dana APBD untuk Belanja Operasi dan Belanja Modal dapat tercapai, dan dapat diketahui dari pencapaian Prosentase Penyerapan Anggaran sebesar **92,52%** (Sembilan puluh dua koma lima puluh dua persen) dan Prosentase fisik mencapai **95,00 %** (Sembilan puluh lima persen).

Sehingga beberapa kegiatan terdapat sisa anggaran diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.632.096.959,-** (Satu milyar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah) atau **7,55 %** (tujuh koma lima puluh lima persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.689.400,-** (Dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) atau **1,48 %** (satu koma empat puluh delapan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.275.801.708,-** (Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus delapan rupiah) atau **12,74 %** (dua belas koma tujuh puluh empat persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah SKPD, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 2.500.000,-** (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau **100 %** (seratus persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 6.552.600,-** (Enam juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) atau **8,15 %** (delapan koma lima belas persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 8.879.150,-** (Delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) atau **1,62 %** (satu koma enam puluh dua persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 315.592.331,-** (Tiga ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) atau **2,98%** (dua koma sembilan puluh delapan persen) dari pagu anggaran yang tersedia.

- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 20.111.770,-** (Dua puluh juta seratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) atau **16,76 %** (enam belas koma tujuh puluh enam persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.766.500,-** (Satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) atau **0,74 %** (nol koma tujuh empat persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 730.500,-** (Tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah) atau **0,42 %** (nol koma empat puluh dua persen) dari pagu anggaran yang tersedia.
- b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, terdapat sisa anggaran sebesar **Rp. 1.036.000,-** (Satu juta tiga puluh enam ribu rupiah) atau **1,58 %** (satu koma lima puluh delapan persen) dari pagu anggaran yang tersedia

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang semaksimal mungkin sesuai dengan pagu anggaran yang sudah tersedia.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Tengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022	
					Target Renja PD 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase keterlaksanaan	100%	-						
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100%	-						
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan program kerja SOPD	10 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	20
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan RKA SOPD	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	20
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100	6 dokumen	6 dokumen	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022	
					Target Renja PD 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	20
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	100%	-						
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan PNS Satpol PP Provinsi Kalteng	5 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	20
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan keuangan akhir tahun SOPD	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	20
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan realisasi keuangan semesteran	10 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	20
1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	-						
1.05.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	20
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	-						20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022	
					Target Renja PD 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 orang	-	50 orang	50 orang	100	50 orang	50 orang	20
1.05.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	250 orang	-	50 orang	50 orang	100	50 orang	50 orang	20
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100%	-						
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/ penerangan	25 jenis	-	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	5 jenis	20
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	30 jenis	-	6 jenis	6 jenis	100	6 jenis	6 jenis	20
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cetak dan penggandaan	35 jenis	-	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	7 jenis	20
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan koran bagi pegawai	15 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	20
1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makanan dan minuman bagi tamu kantor	100 jenis	-	20 jenis	20 jenis	100	20 jenis	20 jenis	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022	
					Target Renja PD 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan keluar daerah	5 tahun	-	1 tahun	1 tahun	100	1 tahun	1 tahun	20
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SKPD	Media informasi online Satpol PP Provinsi Kalteng yang up to date	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	20
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-						
1.05.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat menyurat dan pembelian materai	500 surat/paket	-	100 surat/paket	100 surat/paket	100	100 surat/paket	100 surat/paket	20
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Listrik, telepon dan jaringan internet	15 rekening	-	3 rekening	3 rekening	100	3 rekening	3 rekening	20
1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa pengelola administrasi keuangan dan Gaji Tenaga Kontrak	10 jenis	-	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	2 jenis	20
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	-						
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas/operasional	120 unit	-	20 unit	20 unit	100	20 unit	20 unit	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022	
					Target Renja PD 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service peralatan kantor	34 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	20
1.05.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah provinsi	100%	-						
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100%	-						
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dan cegah dini, serta terlaksananya pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	70 Kab/Kota	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022	
					Target Renja PD 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, unjuk rasa dan kerusuhan massa	70 Kab/Kota	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	20
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sistem keamanan lingkungan dan deteksi dini kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas dan bencana	5 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	20
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat	Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	20 kegiatan	-	4 kegiatan	4 kegiatan	100	4 kegiatan	4 kegiatan	20
1.05.02.1.02	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100%	-						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (ouput	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan Renja PD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD Tahun 2022	
					Target Renja PD 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Prog. Dan Keg. s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani	100%	-						
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Pengawasan kepatuhan pelaksanaan penegakan Perda dan Pergub	70 Kab/Kota	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	20
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70 Kab/Kota	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	20

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, dapat disampaikan beberapa program dan kegiatan yang mendukung kinerja pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain sebagai berikut yaitu :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan, antara lain :

- a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan.
- b. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
 - 2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dibidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sebagai berikut :

1. Memberikan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.
2. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat
3. Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
4. Memberikan Pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak warga masyarakat yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.
5. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
6. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
7. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah.

b. Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

Dalam pelaksanaan Analisa identifikasi lingkungan internal dan Analisa identifikasi lingkungan Eksternal pada Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dengan pendekatan S W O T, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat KEKUATAN (Strength) dan KELEMAHAN (Weakness) yang akan dilakukan, apa yang menjadi PELUANG (OPPORTUNITIES) dan TANTANGAN (THREATS) Dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. **Lingkungan Internal.**
 - a) Kekuatan (Strength)

- 1) Dasar Hukum Keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - 2) Komitmen Masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Publik ;
 - 3) Tersedianya kualitas SDM Aparatur Polisi Pamong Praja di Provinsi, Kabupaten, Kota se - Kalimantan Tengah ;
 - 4) Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong Praja yang memadai ;
 - 5) Terjalannya kondisi dan hubungan kemitraan dengan POLRI, Kabupaten/Kota, Kiai, Ulama dan Tokoh Masyarakat se-Kalimantan Tengah ;
 - 6) Terjalannya kerja sama dengan Aparatur Keamanan (POLRI) dan instansi terkait untuk terciptanya situasi Kalimantan Tengah yang kondusif ;
 - 7) Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka masyarakat Kalimantan Tengah.
- b) Kelemahan (Weakness).
- 1) Keterlambatan penetapan/kurangnya Peraturan Pemerintah/ Protap Tentang Polisi Pamong Praja ;
 - 2) Belum mantapnya materi (Silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja ;
 - 3) Belum Optimalnya tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Operasional lapangan Trantibum ;
 - 4) Belum Optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Polisi Pamong Praja terhadap Tugas ;
 - 5) Anggota Polisi Pamong Praja masih ada yang belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS dan DIKLAT Polisi Pamong Praja;
 - 6) Pelaksanaan Tugas Polisi Pamong Praja di lapangan yang masih belum sesuai dengan Prosedur tetap (PROTAP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
 - 7) Kurangnya kerjasama sosial dan meningkatnya penduduk miskin.
 - 8) Padatnya jumlah penduduk dan penyerapan angkatan kerja yang kurang di Kalimantan Tengah.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (Opportunities)

- 1) Meningkatnya tingkat pendidikan ;
- 2) Mantapnya kerukunan warga masyarakat ;
- 3) Kehidupan Masyarakat yang semakin demokratis diharapkan akan mendorong terciptanya kondisi keamanan yang tertib, aman dan tenteram ;
- 4) Adanya semangat reformasi dan paradigma baru ;
- 5) Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dan partisipasi masyarakat ;
- 6) Tumbuh kesempatan yang luas untuk berprasaangka mengambil keputusan ;
- 7) Terjadinya hubungan dengan aparaturnya POLRI (Eksekutif dan Yudikatif), Dinas dan Badan, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

b. Ancaman (Threats)

- 1) Pengaruh Negatif dengan adanya persaingan Era Globalisasi ;
- 2) Tuntutan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) ;
- 3) Tuntutan Kualitas dan Kuantitas pelayanan Publik ;
- 4) Kontrol sosial semakin meningkat ;
- 5) Lemahnya Koordinasi ;
- 6) Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana hasil pembangunan yang merata akan dapat meningkatkan mobilitas kejahatan ;
- 7) Krisis ekonomi multi dimensi dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat ;
- 8) Terbatasnya Instansi Pemerintah dan Perusahaan Swasta dalam penerimaan tenaga kerja ;
- 9) Terputusnya sektor usaha perdagangan dan pabrik-pabrik pada kota / lokasi tertentu ;
- 10) Krisis ekonomi multi dimensi yang belum juga pulih sehingga dapat menyebabkan naiknya tingkat kejahatan di masyarakat.

c. Analisis Strategis dan Pilihan

Setelah dipilih dan ditetapkan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dari analisa

identifikasi lingkungan eksternal tersebut maka diperoleh suatu kesimpulan Asumsi Analisa SWOT sebagai berikut :

1. Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Perlu adanya penyamaan persepsi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintah dan masyarakat.
3. Perlu tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan Profesional.
4. Perlu adanya semangat kerja dan disiplin yang tinggi bagi setiap aparatur penyelenggara Pemerintahan.
5. Perlu tersedianya anggaran dan sarana prasarana kerja yang cukup.
6. Perlu peningkatan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi Program penanganannya.
7. Perlu penataan kewenangan penanganan trantibum dan penegakan Perda.

Dengan demikian maka, lingkungan strategis tersebut, sangat mempengaruhi tingkat kelancaran dan menunjang tugas-tugas Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah termasuk didalamnya akan mempengaruhi apakah peningkatannya sarana dan prasarana serta peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja akan meningkatkan dengan kondisi ketenteraman dan ketertiban di Provinsi Kalimantan Tengah yang kondusif dengan mewujudkan Good Governance dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Dampak Terhadap Visi dan Misi Pembangunan Provinsi

Menyebabkan target yang ingin di capai dalam jangka waktu tertentu, tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini dapat diukur dengan capaian target SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

e. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja agar dapat mencapai hasil yang optimal sangat ditentukan oleh beberapa faktor pendukung serta penunjang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sarana dan Prasarana Operasional di lapangan

Faktor sarana dan prasarana pendukung operasional di lapangan mempunyai peranan yang cukup penting serta signifikan dalam upaya

pencapaian hasil yang lebih optimal, disamping itu dengan terpenuhinya sarana prasarana dan perlengkapan operasional di lapangan akan memberikan semangat lebih serta etos kerja yang diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Sarana dan Prasarana dimaksud diatas meliputi :

- a) Kendaraan Operasional Roda 4 dan Roda 2.
 - b) Perlengkapan Personil yang memadai dan sesuai dengan ketentuan serta prosedur tetap (Protap) Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c) Pemberian Insentif yang memadai sesuai dengan unsur resiko yang dibebankan kepada personil Satpol PP.
2. Pembiayaan yang bersumber dari dana APBD perlu ditingkatkan sehingga bisa melaksanakan keseluruhan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja melalui berbagai program dan kegiatan yang selama ini belum dilaksanakan agar lebih mendekati kebutuhan ideal dari perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 3. Peningkatan kapasitas serta kuantitas dari personil Satuan Polisi Pamong Praja yang ideal untuk lingkup Provinsi sebagai rujukan untuk Satpol PP Kota Palangka Raya mempunyai jumlah personil Satpol PP sebanyak 197 orang, sedangkan kondisi saat ini untuk Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan memiliki anggota berjumlah 362 terdiri dari PNS 75 Orang dan Tenaga Kontrak 287 Orang personil Satpol PP.
 4. Lemahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemahaman Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur serta Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas, sehingga kerap terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan. Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 adalah seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Gubernur

Kalimantan Tengah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Renja Tahun 2023 adalah:

- Jumlah Program : 2 program.
- Jumlah Kegiatan : 9 kegiatan.
- Jumlah Sub Kegiatan : 35 sub kegiatan.
- Pagu indikatif : Rp. 23.459.615.460,-.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah adalah Cakupan pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi dengan target capaian tahun 2023 sebesar 100 %.

Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan aspek indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani, target capaian 100 %.
2. Persentase Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani, target capaian 100 %.

Pagu Indikatif rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 OPD Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 12.709.410.193,- untuk kegiatan rutin (termasuk gaji Tenaga Kontrak), ditambah untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 10.750.205.267,- sehingga total Pagu Indikatif rancangan awal RKPD Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 23.459.615.460,-. Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada prinsipnya rancangan Rencana Kerja yang di buat tetap mengacu pada Program dan Kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan, kepentingan, dan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- 2) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada usulan program dan kegiatan dari masyarakat (Musrenbang, pikir dan usulan tokoh masyarakat).

Table 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana strategik daerah Kabupaten/Kota secara jelas belum tentu mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Provinsi, hal ini mengingat adanya perbedaan tingkat prioritas pembangunan daerah masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya dan disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah secara umum memiliki kaitan tugas dan fungsi yang baik, namun program dan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki kesamaan program dan kegiatan yang sifatnya berjenjang baik dari tingkat pusat maupun sampai ke daerah. Secara hirarki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu berkoordinasi dan konsultasi baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan Ditjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi yang memerlukan dukungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah yaitu penerapan pelayanan publik di daerah, penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, Rencana Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah harus bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Tujuan dan Sasaran ini dibuat lebih riil dari misi dan diharapkan dapat menjadi pedoman melakukan langkah-langkah selanjutnya.

Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, yaitu :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin diwujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada dalam Rangka Mendorong Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Polisi Pamong Praja Agar Lebih Efektif, Handal, Tangguh dan Profesional.
3. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
5. Meningkatkan Kualitas Anggota Satlinmas Dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, Mendukung Pelaksanaan Pemilu /Pilkada dan Perlindungan Masyarakat.
6. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang Memadai Guna Menunjang Kelancaran Tugas.

b. Sasaran

Adapun sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tujuan dimaksud adalah:

- 1) Meningkatnya pendapatan asli daerah melalui penegakan Perda dan Perkada.
- 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas Polisi Pamong Praja.
- 3) Meningkatnya Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Terkait, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta dan Masyarakat Dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 4) Terlaksananya Deteksi Dini dan Pemetaan Wilayah Rawan Serta Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 5) Meningkatnya kualitas Anggota Satlinmas dalam Tanggap Darurat Bencana, Pam Swakarsa, Mendukung Pelaksanaan Pemilu /Pilkada dan Perlindungan Masyarakat.

- 6) Siapnya sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran tugas.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 ditunjang dengan Belanja Langsung, yaitu Belanja Operasi (Belanja pegawai, belanja barang dan jasa), dan Belanja Modal (Melanja modal peralatan dan mesin, Belanja modal gedung dan bangunan).

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2023 bersumber dari dana APBD Provinsi. Program/kegiatan yang bersumber dari dana APBD Provinsi terdiri atas 2 (dua) Program, 9 (sembilan) Kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 23.459.615.460,-

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
	c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
	g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
	c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
	d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
	e. Fasilitasi Kunjungan Tamu.
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
	g. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan.
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
B. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
7.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
	a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.
	b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.
	c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi.
	d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
	e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
	f. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
8.	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
	a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
	b. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
	c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
9.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
	a. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
	b. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.

Adapun rumusan rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 akan disajikan pada Tabel 3.3 dibawah ini.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan catur untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output,

outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

**KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
TAHUN 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan pengurangan Kemiskinan Masyarakat	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Persentase (%)

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun Anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD selama Tahun Anggaran 2023. Dengan berpedoman pada Rencana Kerja ini diharapkan ke depan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Palangka Raya, November 2022.

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah

No		Target SPM/Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Rasio Anggota Satuan Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	-	-	7:10.000 per 1.000 penduduk	9:10.000 per 1.000 penduduk	9:10.000 per 1.000 penduduk	10:10.000 per 1.000 penduduk	10:10.000 per 1.000 penduduk	7:10.000 per 1.000 penduduk	9:10.000 per 1.000 penduduk	10:10.000 per 1.000 penduduk	-

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah

Nama PD : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				23,458,787,459	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				25,769,000,000	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Presentase Keterlaksanaan</i>	100	22,612,787,459	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		<i>Presentase Keterlaksanaan</i>	100	24,319,000,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100	223,622,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100	243,500,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	40,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	45,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	22,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	15,125,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	16,500,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	25,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	18,537,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	20,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	39,960,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 dokumen	40,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 dokumen	70,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 dokumen	75,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	100	10,775,205,267	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu	100	11,528,000,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 orang	10,750,205,267	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raya	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 orang	11,500,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	15,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	15,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	2 dokumen	13,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	51,840,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100,000,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota P.Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80 stel	51,840,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota P.Raya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80 stel	100,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100	941,909,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	100	1,077,500,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 jenis	7,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 jenis	10,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 jenis	289,571,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 jenis	300,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota P.Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 jenis	70,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota P.Raya	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 jenis	100,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 jenis	10,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 jenis	12,500,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 dokumen	30,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 dokumen	35,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	415,338,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 dokumen	500,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	120,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	120,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	10,208,849,532	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	10,910,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	415,179,532	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	400,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	3 laporan	9,783,670,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	3 laporan	10,500,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	411,361,160	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100	460,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 unit	165,615,460	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota P.Raya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 unit	175,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis	35,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 jenis	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 jenis	35,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 gedung	210,745,700	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Kota P.Raya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 gedung	250,000,000	
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi	100	846,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi	100	1,450,000,000	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100	512,000,000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani	100	850,000,000	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Provinsi Kalteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	35 kasus	53,000,000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Provinsi Kalteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	35 kasus	150,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi Kalteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	35 kasus	54,000,000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Provinsi Kalteng	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	35 kasus	150,000,000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 dokumen	93,000,000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 dokumen	150,000,000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	200,000,000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota P.Raya	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen	150,000,000	
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Kota P.Raya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 orang	100,000,000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Kota P.Raya	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 orang	150,000,000	
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	12,000,000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota P.Raya	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 laporan	100,000,000	
	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani	100	188,000,000	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani	100	300,000,000	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 laporan	92,000,000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 laporan	100,000,000	
	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 laporan	50,000,000	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 laporan	100,000,000	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 laporan	46,000,000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	1 laporan	100,000,000	
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina	100	146,000,000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina	100	300,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 laporan	100,000,000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Provinsi Kalteng	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 laporan	150,000,000	
	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	20 dokumen	46,000,000	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Provinsi Kalteng	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	20 dokumen	150,000,000	

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Tengah
 (Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019)

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				23,459,615,460				25,819,000,000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan		100	22,613,615,460	APBD		100	24,319,000,000
1.05.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu		100	224,450,001	APBD		100	243,500,000
1.05.01.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P.Raya	2 dokumen	40,828,001	APBD		2 dokumen	45,000,000
1.05.01.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	20,000,000	APBD		1 dokumen	22,000,000
1.05.01.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15,125,000	APBD		1 dokumen	16,500,000
1.05.01.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	20,000,000	APBD		1 dokumen	25,000,000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	18,537,000	APBD		1 dokumen	20,000,000
1.05.01.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raya	6 dokumen	39,960,000	APBD		6 dokumen	40,000,000
1.05.01.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota P.Raya	1 dokumen	70,000,000	APBD		1 dokumen	75,000,000
1.05.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu		100	10,775,205,267	APBD		100	11,528,000,000
1.05.01.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raya	72 orang	10,750,205,267	APBD		74 orang	11,500,000,000
1.05.01.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15,000,000	APBD		1 dokumen	15,000,000
1.05.01.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota P.Raya	2 dokumen	10,000,000	APBD		2 dokumen	13,000,000
1.05.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	51,840,000	APBD		100	100,000,000
1.05.01.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota P.Raya	80 stel	51,840,000	APBD		80 stel	100,000,000
1.05.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan		100	941,909,500	APBD		100	1,077,500,000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	5 jenis	7,000,000	APBD		5 jenis	10,000,000
1.05.01.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	6 jenis	289,571,500	APBD		6 jenis	300,000,000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota P.Raya	7 jenis	70,000,000	APBD		7 jenis	100,000,000
1.05.01.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan	Kota P.Raya	3 jenis	10,000,000	APBD		3 jenis	12,500,000
1.05.01.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota P.Raya	1 dokumen	30,000,000	APBD		1 dokumen	35,000,000
1.05.01.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	1 dokumen	415,338,000	APBD		1 dokumen	500,000,000
1.05.01.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	120,000,000	APBD		1 dokumen	120,000,000
1.05.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	10,208,849,532	APBD		100	10,910,000,000
1.05.01.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	1 laporan	10,000,000	APBD		1 laporan	10,000,000
1.05.01.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota P.Raya	3 laporan	415,179,532	APBD		3 laporan	400,000,000
1.05.01.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota P.Raya	3 laporan	9,783,670,000	APBD		3 laporan	10,500,000,000
1.05.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100	411,361,160	APBD		100	460,000,000
1.05.01.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota P.Raya	24 unit	165,615,460	APBD		24 unit	175,000,000
1.05.01.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota P.Raya	5 jenis	35,000,000	APBD		5 jenis	35,000,000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota P.Raya	5 gedung	210,745,700	APBD		5 gedung	250,000,000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi		100	846,000,000	APBD		100	1,500,000,000
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani		100	512,000,000	APBD		100	900,000,000
1.05.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi Kalteng	35 kasus	53,000,000	APBD		35 kasus	150,000,000
1.05.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Provinsi Kalteng	35 kasus	54,000,000	APBD		35 kasus	150,000,000
1.05.02.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Kalteng	1 dokumen	93,000,000	APBD		1 dokumen	150,000,000
1.05.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota P.Raya	1 dokumen	200,000,000	APBD		1 dokumen	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota P.Raya	100 orang	100,000,000	APBD		100 orang	150,000,000
1.05.02.1.01.09	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota P.Raya	1 laporan	12,000,000	APBD		1 laporan	100,000,000
1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani		100	188,000,000	APBD		100	300,000,000
1.05.02.1.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	92,000,000	APBD		1 laporan	100,000,000
1.05.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	50,000,000	APBD		1 laporan	100,000,000
1.05.02.1.02.03	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Provinsi Kalteng	1 laporan	46,000,000	APBD		1 laporan	100,000,000
1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina		100	146,000,000	APBD		100	300,000,000
1.05.02.1.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Provinsi Kalteng	1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.03.02	Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Provinsi Kalteng	20 dokumen	46,000,000	APBD		20 dokumen	150,000,000

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				23,459,615,460				25,819,000,000
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan		100	22,613,615,460	APBD		100	24,319,000,000
1.05.01.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu		100	224,450,001	APBD		100	243,500,000
1.05.01.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota P.Raya	2 dokumen	40,828,001	APBD		2 dokumen	45,000,000
1.05.01.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	20,000,000	APBD		1 dokumen	22,000,000
1.05.01.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15,125,000	APBD		1 dokumen	16,500,000
1.05.01.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	20,000,000	APBD		1 dokumen	25,000,000
1.05.01.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	18,537,000	APBD		1 dokumen	20,000,000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota P.Raya	6 dokumen	39,960,000	APBD		6 dokumen	40,000,000
1.05.01.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kota P.Raya	1 dokumen	70,000,000	APBD		1 dokumen	75,000,000
1.05.01.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu		100	10,775,205,267	APBD		100	11,528,000,000
1.05.01.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota P.Raya	72 orang	10,750,205,267	APBD		74 orang	11,500,000,000
1.05.01.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	15,000,000	APBD		1 dokumen	15,000,000
1.05.01.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota P.Raya	2 dokumen	10,000,000	APBD		2 dokumen	13,000,000
1.05.01.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	51,840,000	APBD		100	100,000,000
1.05.01.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kota P.Raya	80 stel	51,840,000	APBD		80 stel	100,000,000
1.05.01.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan		100	941,909,500	APBD		100	1,077,500,000
1.05.01.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	5 jenis	7,000,000	APBD		5 jenis	10,000,000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota P.Raya	6 jenis	289,571,500	APBD		6 jenis	300,000,000
1.05.01.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota P.Raya	7 jenis	70,000,000	APBD		7 jenis	100,000,000
1.05.01.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota P.Raya	3 jenis	10,000,000	APBD		3 jenis	12,500,000
1.05.01.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota P.Raya	1 dokumen	30,000,000	APBD		1 dokumen	35,000,000
1.05.01.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi Kalteng	1 dokumen	415,338,000	APBD		1 dokumen	500,000,000
1.05.01.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota P.Raya	1 dokumen	120,000,000	APBD		1 dokumen	120,000,000
1.05.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100	10,208,849,532	APBD		100	10,910,000,000
1.05.01.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota P.Raya	1 laporan	10,000,000	APBD		1 laporan	10,000,000
1.05.01.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota P.Raya	3 laporan	415,179,532	APBD		3 laporan	400,000,000
1.05.01.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kota P.Raya	3 laporan	9,783,670,000	APBD		3 laporan	10,500,000,000
1.05.01.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		100	411,361,160	APBD		100	460,000,000
1.05.01.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota P.Raya	24 unit	165,615,460	APBD		24 unit	175,000,000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.01.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota P.Raya	5 jenis	35,000,000	APBD		5 jenis	35,000,000
1.05.01.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota P.Raya	5 gedung	210,745,700	APBD		5 gedung	250,000,000
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Daerah Provinsi		100	846,000,000	APBD		100	1,500,000,000
1.05.02.1.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani		100	512,000,000	APBD		100	900,000,000
1.05.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Provinsi Kalteng	35 kasus	53,000,000	APBD		35 kasus	150,000,000
1.05.02.1.01.02	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Provinsi Kalteng	35 kasus	54,000,000	APBD		35 kasus	150,000,000
1.05.02.1.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Provinsi Kalteng	1 dokumen	93,000,000	APBD		1 dokumen	150,000,000
1.05.02.1.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota P.Raya	1 dokumen	200,000,000	APBD		1 dokumen	200,000,000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota P.Raya	100 orang	100,000,000	APBD		100 orang	150,000,000
1.05.02.1.01.09	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Kota P.Raya	1 laporan	12,000,000	APBD		1 laporan	100,000,000
1.05.02.1.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Persentase penegakan pelanggaran Perda Provinsi dan Pergub yang ditangani		100	188,000,000	APBD		100	300,000,000
1.05.02.1.02.01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	92,000,000	APBD		1 laporan	100,000,000
1.05.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Provinsi Kalteng	1 laporan	50,000,000	APBD		1 laporan	100,000,000
1.05.02.1.02.03	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	Provinsi Kalteng	1 laporan	46,000,000	APBD		1 laporan	100,000,000
1.05.02.1.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Persentase penyidik pegawai negeri sipil yang dibina		100	146,000,000	APBD		100	300,000,000
1.05.02.1.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	Provinsi Kalteng	1 laporan	100,000,000	APBD		1 laporan	150,000,000

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Progam (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraaan Maju 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.05.02.1.03.02	Sub Kegiatan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan di Tempat dan Sekretariat PPNS di Satpol PP secara Operasional Sudah Aktif	Provinsi Kalteng	20 dokumen	46,000,000	APBD		20 dokumen	150,000,000